

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Konflik

Kata konflik dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah percekocokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik secara etimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu "*con*" yang artinya bersama dan "*fligere*" berarti benturan atau bertabrakan, lalu "configere" saling memukul. Sehingga konflik secara sederhana adalah pertentangan dengan dicirikan oleh pergerakan dari berbagai pihak sehingga terjadi perselisihan.

Perlu diketahui bahwa salah satu faktor terjadinya perubahan sosial ialah konflik. Sejatinya, dengan terciptanya konflik sosial maka dalam struktur masyarakat dapat berubah secara fundamental. Di dalam teori konflik tersebut adanya dominasi, koersi dan kekuasaan dalam masyarakat yang menghasilkan perbedaan dan adanya kepentingan yang berbeda juga dapat menimbulkan konflik.

Salah satu tokoh pencetus teori konflik adalah Karl Marx (1818-1883), ia lahir di Kota Trier, di Rhineland bagian Negara Jerman. Ia melanjutkan studi di Berlin untuk menjadi seorang filsuf. ia menerbitkan buku *The German Ideology* (1845) (Singer, 2021). Lalu bersama dengan Friedrich Engels yang merupakan sama-sama pendiri filsafat marxisme, mereka menyusun sebuah buku yang berjudul *Communist Manifesto* pada tahun 1848 (Carver, 2021). Sebagai seorang mahasiswa, filsafat sangat mempengaruhi dirinya, dia adalah penganut Hegel, walaupun tak sepenuhnya sependapat dengan beliau, Marx

mengakui bahwa pemikiran Hegel lah yang mempengaruhi gagasan serta pemikiran beliau. (Woodfin & Oscar, 2008).

Sejatinya, Karl Marx selalu mengecam atas keadaan ekonomi dan ketimpangan sosial yang berada di sekelilingnya dan ia berpendapat bahwa masyarakat tidak mungkin dapat diperbaiki secara tidak menyeluruh. Menurutnya, masyarakat harus diubah secara radikal melalui pendobrakan secara menyeluruh dan total dalam segala sendi-sendinya. Untuk keperluan itu, ia kemudian menyusun teori sosial yang menurut dia didasari oleh hukum ilmiah dan karena itu pasti akan terlaksana. Untuk membedakan dengan ajaran sosialis utopis, ia menamakan teorinya dengan istilah sosialisme ilmiah (Budiardjo, 2008: 78).

Teori Konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx menegaskan, bahwa teori ini dipicu dalam hubungan pertentangan antar kelas borjuis yang melawan kelas proletariat dalam merebut hak-hak ekonomi (alat produksi). Karl Marx menegaskan bahwa terdapat dua kelas yang saling bertentangan ini di dalam masyarakat pada abad ke – 19, yaitu: kelas borjuis dan kelas proletar.

a. Borjuis

yang dimana kelas borjuis ialah nama dari pemilik modal perseorangan (kapitalis), para kapitalis ini memiliki alat – alat produksi dan mempekerjakan para buruh dengan diberi upah. Konflik antar kelas proletar dan borjuis adalah realitas dari kontradiksi matrealisme yang sesungguhnya. Kontradiksi ini semakin lama semakin berkembang yang menjadi kontradiksi konflik kapitalisme dengan pekerja.

b. Proletar

Sedangkan kelas proletariat (buruh) adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi kelas sosial yang rendah. Mereka adalah orang – orang yang tidak memiliki alat produksi dan modal sendiri. Sehingga proletariat menggunakan jasanya untuk bekerja kepada kaum borjuis.

Namun dalam sistem produksi kapitalis, kedua kelas ini berada dalam suatu struktur sosial yang hierarki, pada dasarnya kepentingan antara kedua kelas itu secara objektif berlawanan dengan satu sama lain. Di dalam setiap kelas sosial, setiap kelasnya memiliki suatu kepentingan sendiri, dan kepentingan tersebut ditentukan oleh situasi yang objektif (Suseno, 2000: 116). Maka dari itu, buruh tidak bisa hidup jika tidak bekerja, dan sebaliknya, para pemilik pabrik tetap bertahan lama bila mereka tidak memiliki pendapatan hidup. Ia dapat hidup dari modal yang ia miliki selama alat produksi masih bekerja, ataupun ia dapat menjual pabrik dan alat produksinya. Sistem produksi kapitalis ini keduanya saling bergantung satu sama lain namun tidak seimbang.

Dalam kelas borjuis, kepentingannya adalah mengumpulkan laba sebanyak-banyaknya, bukan dikarenakan rakus melainkan ingin tercapainya target laba dari persaingan pasar bebas. Maka dari itu para pemilik modal dengan sengaja menekan biaya produksi dengan cara mengeksploitasi tenaga kerja buruh (proletariat) yang dibelinya dengan diberi serendah mungkin. Dan sebaliknya, kelas buruh berkepentingan untuk mendapatkan upah sebanyak-banyaknya untuk mengurangi jam kerja, dan menguasai kondisi pekerjaan mereka. Dengan demikian untuk mengambil alih pabrik tempat kerja mereka

dari tangan kelas pemilik. Secara objektif kepentingan antara kedua kelas ini sangat bertentangan.

Ciri masyarakat kapitalis ialah adanya pembagian dalam kelas – kelas sosial, yaitu kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas adalah para pemilik alat produksi, sedangkan kelas bawah adalah kaum buruh. Hubungan antara kelas atas dan kelas bawah merupakan hubungan kekuasaan. Kekuasaan itu yang pada hakikatnya berdasarkan kemampuan majikan untuk meniadakan kesempatan buruh untuk bekerja dan memperoleh nafkah yang dipakai untuk menindas keinginan kaum buruh untuk menguasai pekerjaan mereka sendiri, untuk tidak dihisap, agar kaum buruh bekerja seluruhnya demi mereka.

Karl Marx (dalam Turner, 1998) memberikan pernyataan tentang kehidupan sosial, antara lain:

- a. Masyarakat diibaratkan sebagai panggung yang didalamnya memiliki berbagai macam pertentangan.
- b. Negara dipandang sebagai salah satu pelaku yang aktif dalam pertentangan dan negara selalu berpihak kepada kekuatan yang dominan.
- c. Paksaan (*coercion*) dalam wujud hukum diilustrasikan sebagai faktor utama untuk memelihara lembaga-lembaga sosial, seperti kepunyaan milik pribadi (*property*), perbudakan (*slavery*), dan kapital yang menimbulkan ketidaksamaan hak dan kesempatan.

- d. Adanya kelas-kelas dipandang sebagai kelompok-kelompok sosial yang mempunyai kepentingan sendiri yang bertentangan satu sama lain, sehingga konflik tak dapat dihindarkan lagi.

Sedangkan Ralf Dahrendorf, teori yang dia bangun merupakan hasil teori dengan dasar untuk menentang secara objektif terhadap teori fungsional struktural yang dimana teori tersebut kurang memperhatikan fenomena konflik dalam suatu masyarakat. Ralf Dahrendorf adalah seorang sosiolog berkebangsaan Jerman lahir pada tanggal 1 Mei 1929, ia adalah pengembang teori konflik kontemporer.

Walaupun demikian, teori konflik Dahrendorf melibatkan suatu pandangan kritis terhadap pemikiran marxisme, ia membangun teori ini dengan separuh penolakan dan separuh penerimaan dengan memodifikasi teori sosial menurut Marx. Berbicara mengenai masyarakat yang kompleks, Dahrendorf menganalisis tentang konflik antar kelompok yang terkoordinasi (*imperaticelu coordinate assosiation*), dan tidak menganalisis tentang perjuangan kelas lalu elit dominan seperti yang dilakukan oleh Marx (Mc Quarie, 1995:66 dalam Susan, 2009: 38).

Bagi Dahrendorf (1959: 164-165), konflik muncul melalui relasi-relasi sosial dalam suatu sistem. Setiap individu maupun kelompok yang tak terhubung dalam suatu sistem tak akan mungkin terlibat dalam konflik. Dahrendorf menyimpulkan sebagai "*integrated into a common frame of reference*". Ia menyebutkan bahwa unit analisis dalam sosiologi konflik adalah keterpaksaan yang menciptakan kelompok-kelompok sosial bisa bersama sebagai suatu sistem

sosial. Dahrendorf (dalam Susan, 2009) memahami relasi-relasi dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan.

Seperti yang dikatakan oleh Dahrendorf, dengan kekuasaan inilah tercipta kelompok penguasa dan kelompok yang dikuasai yang dimana hubungan ini menimbulkan asosiasi yang berkontradiksi satu sama lain sehingga timbul konflik. Timbulnya konflik ini dikarenakan oleh konsensus antar kelompok. Konsensus ini berpotensi menimbulkan konflik karena kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda. Kemudian Dahrendorf membagikan kelompok menjadi 3 tipe:

- a. Kelompok semu
- b. Kelompok kepentingan
- c. Kelompok konflik

Kelompok semu adalah sejumlah pengisi kepentingan yang serupa, tetapi kelompok ini belum menyadari keberadaannya. Kelompok ini termasuk kelompok kedua, yaitu kelompok kepentingan. Dengan kepentingan tersebutlah melahirkan kelompok ketiga yakni kelompok konflik. Dan selanjutnya, di dalam kelompok tersebut memiliki dua perkumpulan, yaitu kelompok yang berkuasa (atasan) dan kelompok yang dikuasai (bawahan). Dalam hakikatnya kedua kelompok ini memiliki tujuan yang berbeda, sehingga kelompok yang diatas ingin mempertahankan *status quo* demi kepentingan kelompoknya. namun pada akhirnya menurut Dahrendorf, mereka ada juga yang akan dipersatukan oleh kepentingan yang sama.

Dahrendorf (dalam Susan, 2009: 42) menyebut teori konflik dirinya sebagai sosiologi konflik dialektis yang menjelaskan proses terus-menerus distribusi kekuasaan dan wewenang dalam kelompok-kelompok terkoordinasi. Sehingga dalam realitas sosial, dahrendorf menuturkan bahwa siklus tak berakhir dari adanya konflik wewenang dalam bermacam-macam tipe kelompok terkoordinasi dari sistem sosial.

Sedangkan teori konflik menurut Lewis A. Coser, konflik tidak hanya berwajah negatif, konflik memiliki fungsi positif terhadap masyarakat melalui perubahan – perubahan sosial yang diakibatkannya. Sehingga Coser (dalam Wallace & Wolf, 1995; Susan, 2009: 43) bersikukuh pada fungsi konflik sosial dalam sistem sosial, yakni dalam hubungan kelembahaan yang kaku, perkembangan teknis, dan produktivitas, lalu memperhatikan hubungan antara konflik dan perubahan sosial. Sejatinya, Coser menolak adanya paham bahwa hanya konsensus dan kerja samalah yang memiliki fungsi terhadap integrasi sosial.

Lewis A. Coser (dalam Susan, 2009: 43-44), membagi konflik menjadi dua tipe, yakni konflik realistik dan nonrealistik. Konflik realistik mempunyai sifat materi, contohnya perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Bila diperoleh tanpa perkelahian, maka konflik segera diatasi dengan mudah. Sedangkan konflik nonrealistik dipicu oleh keinginan yang tidak rasional atau bersifat ideologis, seperti konflik antar agama, antar – etnis, antar – kepercayaan, dan lain sebagainya. Konflik nonrealistik merupakan suatu cara menurunkan ketegangan atau mempertegas identitas suatu kelompok, dengan cara tersebut dapat mewujudkan bentuk kekejian yang turun dari sumber lain. Konflik

nonrealistik cenderung lebih sulit untuk menemukan perdamaian dan tidak akan mudah untuk mendapatkannya.

Melalui buku *The Function of Social Conflict* (1957), Lewis A. Coser (dalam Susan, 2009) memberikan perhatian kepada konflik eksternal dan internal. Konflik eksternal menimbulkan manifest identitas kelompok. “Menurutnya, konflik membuat batasan antar-kelompok dalam sistem sosial dengan memperkuat kesadaran, dan kesadaran kembali atas keterpisahan sehingga menciptakan kesadaran identitas dalam sistem” (Coser, 1957 dikutip dari Susan, 2009). Sedangkan kelompok eksternal menjadi sebuah proses refleksi kelompok identitas mengenai kelompok di luar mereka, maka akan meningkatkan partisipasi setiap anggota terhadap pengorganisasian kelompok. Kelompok identitas di luar mereka ini disebut “*negative reference group*”.

1. Revolusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), revolusi berarti perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan (seperti dengan perlawanan bersenjata). Menurut Musa Asy'ari (dalam Sarbini 2005: x), revolusi adalah suatu perubahan yang bersifat sangat cepat serta fundamental dengan mengubah setiap sendi kehidupan secara radikal, yang ditandai dengan kekerasan akibat konflik yang terjadi di setiap sendi kehidupan bermasyarakat.

Dalam perspektif sejarah, akan menyadari jika tanpa adanya revolusi, maka dinamika kehidupan dalam bermasyarakat akan berjalan dengan lamban. Baik segi sosial, ekonomi, politik, hukum, kebudayaan, sains dan teknologi, serta keagamaan (Asy'ari dalam Sarbini, 2005: xi).

Jadi, tidak dipungkiri bahwa revolusi menjadi laju perkembangan untuk membangun sebuah peradaban yang baru.

Sztompka (dalam Anwar & Sohiron, 2020: 10) memberikan ilustrasi mengenai revolusi, bahwa revolusi adalah puncak dari perubahan sosial, sehingga revolusi merupakan proses penciptaan secara ulang dalam masyarakat sehingga menyamai proses kelahiran kembali. Maka, melalui revolusi inilah perubahan yang terjadi dapat memiliki cakupan yang luas dan menyentuh semua tingkatan dan dimensi dalam masyarakat. Perubahan akibat revolusi bersifat radikal, fundamental dan menyentuh langsung pada inti dan fungsi dari struktur sosial. Proses perubahan tersebut hanya memerlukan waktu yang cepat, sesuatu yang bertolak belakang dengan konsep evolusi pada perubahan sosial. Dapat dikatakan bahwa revolusi merupakan sebuah alat gerakan massa untuk melakukan upaya dengan menghancurkan, menjebol, dan membangun dari sistem yang sudah usang kepada suatu sistem sangat baru demi memperebutkan kekuasaan yang ideal menurut paradigma mereka. Dalam pergerakan revolusi bisa dikatakan dapat menimbulkan disintegrasi sosial, ekonomi, maupun politik (Djazifah; 2012).

Theda Scocpol (dalam Faisal & Syam, 2015), revolusi adalah perubahan cepat dalam struktur sosial – politik secara beriringan dan setiap struktur ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sehingga perubahan ini menyangkut melalui konflik sosial dan politik yang kuat. Termasuk menyangkut aksi perjuangan kelas turut memainkan peranan yang sangat kuat.

Sementara itu, Teori revolusi dikemukakan oleh Karl Marx (dalam Sarbini 2005: 161), menjelaskan bahwa laju perkembangan masyarakat dan tingkatan kekuatan produksi material masyarakat berada dalam perselisihan antara keberadaan hubungan produksi di tempat mereka bekerja. Dalam bentuk perkembangan kekuatan produksi berubah menjadi suatu pengekangan (penindasan). Konflik di antara kekuatan produksi baru dengan hubungan produksi lama itulah yang menciptakan suatu gerakan revolusi. Sarbini (2005: 161) juga menyebutkan dari sini, Marx memperkirakan bahwa sistem kapitalisme akan menciptakan kesejahteraan sekaligus penderitaan. Yang dimaksudkan dari kesejahteraan adalah bagi dalam kelas borjuis yang semakin mengecil dan penderitaan dalam kelas buruh (proletariat) kian membesar. Ketegangan antara borjuis dan proletariat akan mendorong kaum proletariat untuk bersatu dan sadar-kelas. Ketegangan tersebut lantas mengarah pada revolusi yang disebut “revolusi sosial”. Dengan merebut kekuasaan dan menghapus hak milik pribadi, proletariat akhirnya menciptakan masyarakat tanpa kelas. (Suseno, 2000: 170).

Bagi komunitas revolusioner sendiri, revolusi ialah sebagai wujud pemberontakan dari kekuatan produksi melawan hubungan sosial yang ada (Kabelen, 2019). Sejak masyarakat terbelah menjadi kelas-kelas sosial, perjuangan ini termanifestasikan dalam perjuangan kelas; antara tertindas dan penindas, antara kelas penguasa dan dikuasai, antara kaum borjuis dan kaum proletar.

Adapun tokoh-tokoh pendukung teori revolusi yang dapat dikemukakan adalah Mac Iver (dalam Jacobus, 2015: 37-38) Menurutnya, revolusi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, diantaranya:

1. Revolusi Nasional

Revolusi Nasional adalah penerobosan terhadap kekuasaan bangsa asing dikarenakan adanya suatu pergerakan nasional. Gerakan ini didorong oleh penderitaan secara materiil maupun dengan secara spiritual. Revolusi ini didasari dari gagasan nasionalisme, patriotisme, dengan penuh emosi dan harga diri yang tinggi. Revolusi nasional ialah perubahan yang didasari dari awal kembali, maksudnya adalah perubahan yang sangat signifikan dalam suatu masyarakat untuk mengganti sistem politik, ekonomi, kebudayaan dengan sistem yang lain. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan tanpa melalui saluran-saluran konstitusi tetapi dengan kekerasan. Revolusi muncul bukan karena krisis dari ekonomi pangan, akan tetapi adanya disharmonis diantara kehidupan masyarakat. seandainya saja ada harmoni antara rakyat dengan pemerintah maka negara dapat dipastikan sempurna. Pemerintah yang cenderung memikirkan kekuasaannya saja tanpa mendengar keinginan-keinginan rakyat yang semakin hari semakin sengsara, tak akan dapat hidup lama lagi, pasti mengundang reaksi perebutan kekuasaan. Dan begitu sebaliknya jika pemerintah mendengarkan tuntutan dari rakyat tanpa memiliki

perhitungan dalam kemampuan alat-alat kekuasaan, pemerintah akan runtuh.

2. Revolusi Kelas (Sosial)

Dan demikian dengan revolusi kelas ialah penerobosan terhadap rezim dengan cara penindasan (oligarki). Perubahan karena gerakan yang berusaha membongkar keadaan semula bertindak menindas.

Revolusi dalam pandangan sosiologis dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2015: 247 – 248), menyebutkan pada dasarnya revolusi dapat bergerak atau terjadi harus dipenuhi oleh beberapa kriteria, yaitu:

1. Adanya hasrat secara umum untuk mewujudkan suatu perubahan. Di dalam kehidupan masyarakat harus ada dorongan perasaan tidak puas terhadap keadaan, dan harus ada suatu keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan keadaan tersebut.
2. Adanya pemimpin atau sekelompok orang yang mampu memimpin masyarakat tersebut.
2. Pemimpin dalam masyarakat ini memiliki ketertarikan dan keinginan untuk mewadahi seluruh keinginan masyarakat untuk selanjutnya dirumuskan serta menegaskan rasa ketidakpuasan tersebut untuk kemudian dijadikan sebuah strategi dan arah untuk pergerakan.
3. Pemimpin ini memiliki tujuan konkrit pada masyarakat. dan perlu juga suatu tujuan yang abstrak, misalnya perumusan suatu gagasan/ideologi tertentu.

4. Memiliki sebuah kesempatan yang baik dalam keadaan dan faktor sudah tepat dan baik untuk memulai pergerakan, apabila kesempatan tersebut keliru maka revolusi akan dinyatakan gagal.

Vilredo Pareto cs (dalam Jacobus, 2015: 38), berpendapat bahwa revolusi memiliki dua sifat, yakni (1) *Coup d'etat*: perebutan kekuasaan yang terjadi di pusat. Dan (2) *Putch*: perebutan suatu kekuasaan yang terjadi di daerah. Maka dari itu bentuk dan politik pemerintahan masih bersifat tetap, hanya saja pemegang kekuasaan lah yang berubah. Sehubungan dengan pengertian revolusi ini, dalam perebutan kekuasaan ada yang menggunakan kekuatan rakyat, dan ada juga yang menggunakan angkatan perang. Dalam setiap peristiwa revolusi salah satu pemimpin ada saja yang kontradiksi terhadap revolusi, di satu sisi pihak menjebol sedangkan di pihak lain membangun.

Berdasarkan pendapat ahli sosiologi, Wilbert (1963) mengemukakan bahwa kejadian revolusi tidak akan terjadi secara tergesa – gesa, dan ada juga revolusi yang sudah mencapai puncaknya akan tetapi revolusi tersebut tidak pernah pecah. Dalam pandangan wilbert sendiri, hal itu terjadi ketika revolusi pecah memiliki suatu kegagalan dalam proses evolusi. Tahap dalam revolusi tercapai diakibatkan oleh krisisnya kebutuhan sosial maupun politik.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah acuan untuk membedakan antara penelitian yang akan dikaji. Manfaat dari penelitian terdahulu ialah agar mengetahui bagaimana hasil yang sudah ditemukan dan dikaji di dalam

penelitian terdahulu. Dengan hal ini, berdasarkan penelusuran dalam pengetahuan ini, peneliti telah mendapatkan temuan dari beberapa peneliti terdahulu serta kajian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Yaitu di antaranya:

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
Argo Singgih Pratama (2019)	Pemikiran Politik Ekonomi Tan Malaka Dan Relevansinya Di Indonesia	Tan Malaka yang menolak kapitalisme di Indonesia, negara mempunyai hak untuk mengambil kembali alat produksi yang telah dirampas bangsa asing dan memberikan alat produksi tersebut kepada rakyat. Tan Malaka menginginkan kemerdekaan Indonesia 100%, dalam pandangan politiknya Tan Malaka menginginkan Indonesia menganut ideologi sosialisme untuk menjalankan politik ekonominya dan pada kapitalisme, ia menganggap sosialisme cocok dengan kondisi kultur dan pemikiran rakyat Indonesia.	Subjek penelitian yang sama yakni sama-sama mengenai pemikiran Tan Malaka.	Penelitian ini berada pada objek penelitian yang berbeda. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengenai politik ekonomi.
Fatur Rahman Asrul Tahun (2018)	Negara Dalam Pemikiran Tan Malaka	Negara hasil dari terbentuknya dari pertentangan kelas-kelas sosial yang tak dapat didamaikan. Negara muncul akibat pertentangan di dalam kelas-kelas masyarakat, dibangunnya negara (kekuasaan) membuat pertentangan kelas menjadi tidak sia-sia. Menurut Tan, membangun negara ideal adalah negara yang berbentuk republik, bukan republik yang berasaskan <i>Trias Politica</i> , akan tetapi negara Republik yang dikelola oleh sekelompok organisasi tunggal. Dan negara yang merdeka, ialah negara yang tidak mengancam kepada bangsa negara lain, dan negara yang terbebas dari ancaman dan kekangan oleh bangsa sendiri	Subjek penelitian yang sama yakni sama-sama mengenai pemikiran Tan Malaka.	Objek penelitian yang berbeda. Pada penelitian ini membahas mengenai Negara dalam pemikiran Tan.

Ardy Arfian (2015)	Pandangan Politik Tan Malaka Tentang Konsep Negara Republik	Penelitian ini menggunakan kajian historik (sejarah), serta pendekatan multidimensional. Tahapan dalam kajian historik adalah Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Hasil dari pembahasan adalah Pandangan politik Tan Malaka tentang Negara Republik yang berkaitan dengan Revolusi Pra Kemerdekaan meliputi (1) Seluruh rakyat harus memiliki jiwa nasionalis yang berkobar-kobar, (2) Memberikan pendidikan kepada Rakyat Indonesia, (3) Sistem politik untuk membentuk negara republik dengan persatuan (Menggagas Persatuan Indonesia), (4) Menjalankan sistem politik dengan melakukan pergerakan, tindakan dan berani melakukan perubahan dari hal yang mendasar, (5) Penerapan strategi politik “massa aksi” sebagai pengerahan kekuatan rakyat. Sedangkan pandangan politik Tan Malaka yang berkaitan dengan Revolusi Pasca Kemerdekaan yaitu bertindak tegas melawan penjajah dengan kekuatan rakyat penerapan kembali strategi Massa Aksi dan dengan cara bergerilya.	Subjek penelitian yang sama yakni sama-sama mengenai pemikiran Tan Malaka.	Objek penelitian yang berbeda. Pada penelitian ini membahas mengenai konsep negara republik menurut pemikiran Tan Malaka secara garis besar.
--------------------	---	--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini secara mendalam terkait dengan konsep revolusi yang ideal dalam pemikiran Tan Malaka.

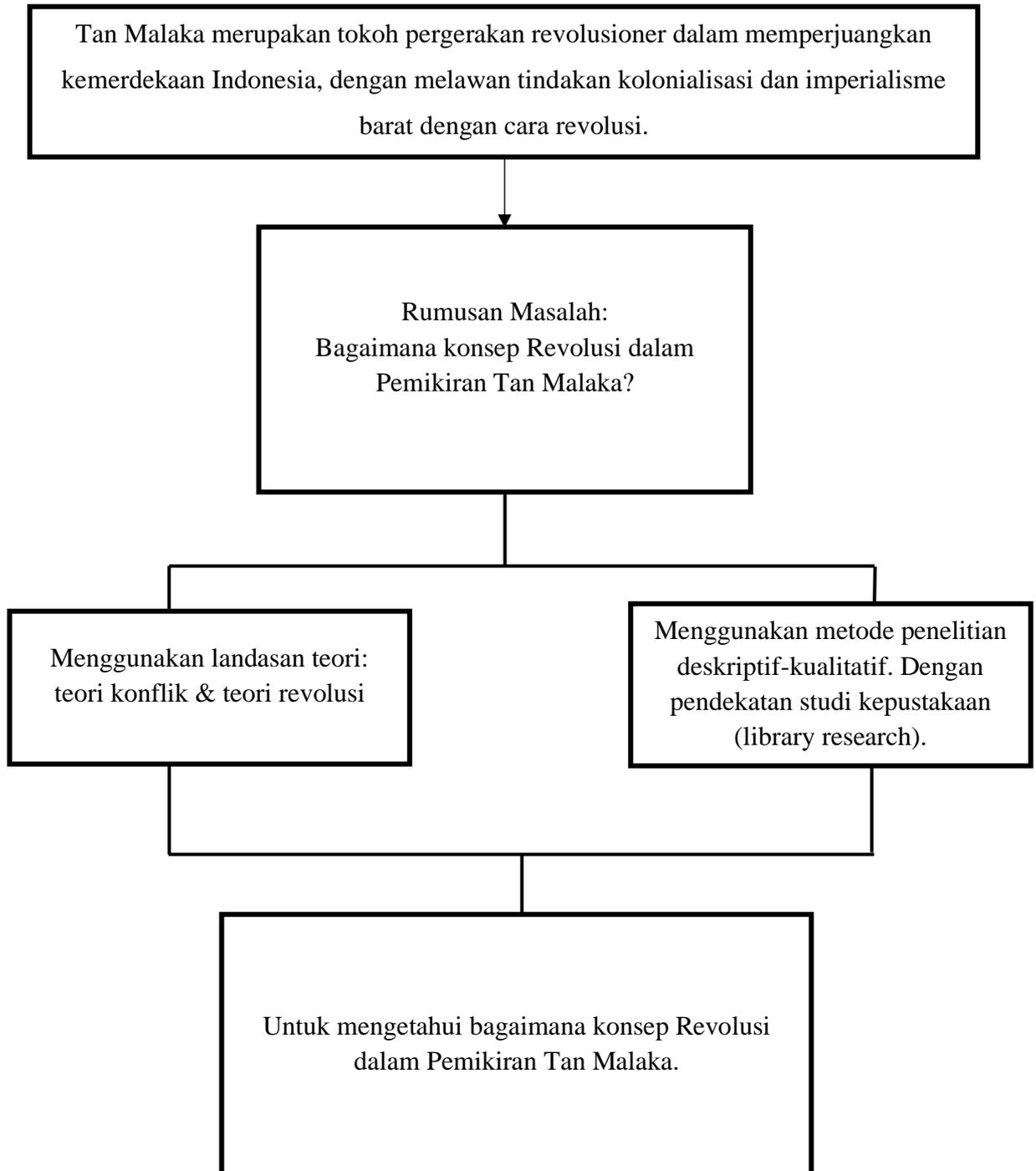
C. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2016:60), menjelaskan mengenai Kerangka Pemikiran yang berada di dalam penelitian ilmiah. Kerangka berpikir adalah sebuah model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Gambar 1.

Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Tan Malaka (1897 – 1949) adalah seorang intelektual Indonesia dan seorang pahlawan revolusioner Indonesia, yang menginginkan negara Indonesia adalah negara sosialis. Pemikiran dan gagasan beliau terkait kemerdekaan, dia mengusulkan revolusi yang menurutnya sebagai upaya dalam membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu kolonialisme dan imperialisme dari pihak Belanda. Dalam puncaknya Tan Malaka menolak aksi diplomasi terhadap pihak Belanda yang menurutnya hanya menguntungkan pihak kolonialisme dan merugikan pihak Indonesia. Dengan menggunakan landasan teori dari teori konflik dan teori revolusi. Serta penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, dengan pendekatan penelitian menggunakan studi pustaka (*library research*).